

**EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI**



A M A R

P0200203503

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI KECAMATAN SINJAI TENGAH
KABUPATEN SINJAI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai gelar Megister

**Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

Disusun dan diajukan oleh

A M A R

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

A M A R

Nomor Pokok P0200203503

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 15 Agustus 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H.M Tahir Kasnawi, SU
Ketua

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc
Anggota

**Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

**Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin**

DR. IR. Roland A. Barkey

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha, M. Sc

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan
Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai

Nama Mahasiswa : A m a r

Nomor Pokok : P0200203503

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H.M Tahir Kasnawi, SU
Ketua

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc
Anggota

Mengetahui,
Ketua Program Studi PPW

Dr. Ir. Roland A. Barkey

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan keAdirat Allah Subhana Wataala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Gagasan yang melatarbelakangi tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis atas pelaksanaan program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) di Kecamatan Sinjai Tengah. Untuk itu penulis bermaksud mengetahui dampak pelaksanaan program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, hanya karena bantuan, bimbingan dan arahan berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU, sebagai ketua komisi penasehat dan Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc, sebagai anggota komisis penasehat, yang dengan tulus menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam rangka penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. A. R. Hafidz, MS, Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahman. Mappangaja, M. Sc dan Bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey, M. Sc, selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan arahan demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Yulianto Sumalyo, DEA, mantan Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey, M.Sc, sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah serta seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti proses pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M, Nasir Nessa, M.S mantan Direktur Program Pascasarjana dan Bapak Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M. Sc, selaku Direktur beserta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas bantuan dan dorongan yang diberikan
5. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya program studi Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW) angkatan 2003 serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, kebersamaan, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
6. Akhirnya, rasa terima kasih penulis tujukan kepada almarhum dan almarhumah Ayahanda A. Ibnuhajar dan A. Hasma, saudaraku tercinta dan istriku A. Kartini, SP serta anak-anakku A. Butsainah Tumadir, A. Yamna Yusria, A. Yumna Yusria, A. Muhammad Afla Aiman dan A. Fitria Fauzan, yang penuh pengertian, pengorbanan, keihlasan dan doa yang senantiasa mengiringi penulis dalam menepuh dan menyelesaikan studi.

7. Kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya semoga dapat memberikan ganjaran yang setimpal. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini bagi pengembangan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Makassar, Agustus 2008

Amar

ABSTRAK

AMAR. Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi dan Dr. Ir. Didi Rukmana, M. Sc).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian antara rencana Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) dan hasil yang dicapai dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data menggunakan teknik dikriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan. Pendekatan ini menggunakan kedalaman interpretasi tabel-tabel frekwensi dengan menggunakan instrumen pengambilan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan focus group discussion. Populasi dari penelitian ini adalah kepala keluarga penerima manfaat dari hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 yang bermukim di enam desa di kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 200 KK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) memberikan dampak positif bagi masyarakat di enam desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan status perkembangan usaha, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pendidikan, aksesibilitas dan kesehatan.

ABSTRACT

AMAR. Evaluatio of Capacities Reinforcement Program Development Basic Facilities Rural to Socioeconomic Condition Society in District Sinjai Middle of regency Sinjai (Guided By Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi and Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc)

This study bent on to know Attainment between plan of capacities reinforcement program development basic facilities rural (PKP2D) and reached result and its influence to Socioeconomic Condition Society in District Sinjai Middle of regency Sinjai. Data collecting uses technique descriptive qualitative with comparability approach that is compare to socioeconomic condition society before and after the execution Capacities Reinforcement Program Development Basic Facilities Rural. This approach used deepnes of frequency tableses interpretation by using instrument of data intake pass by questioner, interview, observation and focus group discussion. Population from research this is the familiy head of benefit receiver from development result basic facilities program PKP2D budget year 2003 and 2004 that residence in six country sides in District Sinjai Middle 200 KK.

Research result indicated that execution of capacities reinforcement program development basic facilities rural (PKP2D) give positive impact for society in six countryside referred. This condition can be seen from improvement of effort growth status, job opportunity, rate of return, house ownership, education level, accebility and health.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat	6
II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Pengembangan Wilayah	7
B. Konsep Kawasan Pembangunan dan Strategi Pengembangannya	11

C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	16
D. Indikator Ekonomi Sosial Pembangunan Wilayah	18
E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Strategi Pengembangannya	24
F. Pembangunan Wilayah Pedesaan	37
G. Penguatan Kelembangan Pengembangan Prasarana Perdesaan	44
H. Kerangka Fikir	50
III. METODE PENELITIAN	67
A. Lokasi Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	67
C. Populasi Sampel	68
D. Jenis dan Sumber Data	69
E. Metode Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data	70
G. Defenisi Operasional	72
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
B. Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan	96
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	119
A. Diskripsi Identitas Responden	119
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program PKP2D	124

C. Analisis Dampak Program Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah	130
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

nomor		halaman
1.	Analisis komparatif strategi dan kebijakan pembangunan regional	22
2.	Luas wilayah, jarak kota kabupaten & jumlah penduduk	79
3.	Luas wilayah dan penyebaran penduduk menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah	85
4.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio menurut desa di Kecamatan Sinjai Tengah.	86
5.	Jumlah rumah tangga /Kepala keluarga dan rata-rata jumlah anggota kelurahan tiap RT menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah.	87
6.	Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Sinjai Tengah.	88
7.	Penduduk menurut mata pencaharian dirinci di Kecamatan Sinjai Tengah.	89
8.	Ketersediaan prasarana jalan, jembatan dan irigasi di Kecamatan Sinjai Tengah.	91
9.	Ketersediaan prasarana dan tenaga jesehatan di Kecamatan Sinjai Tengah.	92
10.	Hasil pembangunan prasarana Program PKP2D Tahun anggaran 2003 & 2004 di Kecamatan Sinjai Tengah.	107
11.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Mattunreng Tellue.	110
12.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Kelurahan Samaenre.	111
13.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Saotengnga.	112

14. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Saotanre.	113
15. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Bonto.	114
16. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Pattongko.	114
17. Keadaan responden menurut umur di Kecamatan Sinjai Tengah	120
18. Keadaan responden menurut pendidikan di Kecamatan Sinjai Tengah.	121
19. Keadaan responden menurut pekerjaan pokok di Kecamatan Sinjai Tengah	122
20. Keadaan responden menurut jumlah anggota keluarga di Kecamatan Sinjai Tengah.	123
21. Keadaan responden menurut tingkat pendapatan di Kecamatan Sinjai Tengah.	124
22. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap perencanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	127
23. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	128
24. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	129
25. Perubahan Perkembangan usaha setelah program PKP2D.	131
26. Perubahan Kesempatan kerja setelah program PKP2D.	133
27. Perubahan Tingkat pendapatan setelah program PKP2D.	135
28. Perubahan Kondisi Perumahan setelah program PKP2D.	137
29. Perubahan Kemampuan meningkatkan pendidikan setelah program PKP2D	140
30. Perubahan tingkat aksesibilitas setelah program PKP2D.	142

- | | |
|---|-----|
| 31. Perubahan tingkat kesehatan setelah program PKP2D. | 144 |
| 32. Hasil Analisis dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. | 145 |

DAFTAR GAMBAR

nomor	halaman
1. Kerangka Mekanisme Program PKP2D.	56
2. Kerangka Pikir	66
3. Penetapan Kawasan Prioritas Pemberdayaan Sosisal Ekonomi Masyarakat (KSPM)	100
4. Peta Kabupaten Sinjai	84
5. Peta Kecamatan Sinjai Tengah	97

DAFTAR LAMPIRAN

nomor	halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian	161
2. Nama dan Identitas Responden	172
3. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Analisis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Prasarana Program PKP2D Kec. Sinjai Tengah	176
4. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kondisi Ekonomi dan Sosial di Kecamatan Sinjai Tengah	180
5. Foto Pelaksanaan Penelitian	186
6. Foto Pelaksanaan Prasarana Program PKP2D Kec. Sinjai Tengah	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah mencoba melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional sejak repelita VI.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yakni, UU No, 26 tahun 2007 mengatur tentang, penataan ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dimana struktur ruang adalah pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan fungsional, dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan strategis atau andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar daerah .

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (prime mover), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu wilayah, memiliki sector unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (hinterland),(Rorat, 1996:15).

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui pemberdayaan sector/ subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat “ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variable ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan”. (Kuncoro, 2000:18).

Demikian pula undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberi kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengembangkan wilayah untuk kesejahteraan rakyatnya. Berkaitan dengan undang-undang tersebut diatas maka pemerintah daerah memacu diri untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara bijaksana, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan pada rencana tata ruang yang ditetapkan sejalan dengan arahan tata ruang orde diatasnya (propinsi dan Nasional).

Kabupaten Sinjai memiliki wilayah yang luasnya sebesar 81.996 Ha, terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan memiliki visi dalam Restra 2003-2008” Terwujudnya Sinjai lebih maju dan terkemuka dengan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian lokal”, dimana Kecamatan Sinjai Tengah merupakan salah satu wilayahnya.

Kecamatan Sinjai Tengah memiliki topografi terdiri dari perbukitan sampai pegunungan, keadaan topografi demikian menyebabkan Sinjai Tengah memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti potensi peternakan, pertanian dan perkebunan. Namun disadari bahwa dengan kondisi wilayah seperti itu memberi keuntungan dilain sisi menimbulkan kendala tersendiri dalam pengembangannya mengingat infrastruktur pendukung berupa prasarana, sarana produksi dan transportasi masih belum memadai. Rendahnya sumberdaya manusia, minimnya permodalan petani dan masyarakat serta sering menurunnya semangat petani dalam mengelola bidang usahanya akibat selalu terkendala dari segi pengendalian hama, perolehan pupuk yang kadang langka pada saat dibutuhkan serta pemasaran pada saat produksi melimpah, harganya sangat murah .

Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi, peluang, ancaman serta kendala yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat petani maka pemerintah daerah mencoba mengatasi hal tersebut dengan mensinergikan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada serta mencoba mengatasi kendala melalui program Penguatan Kelembagaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan ketersediaan prasarana infrastruktur yang berperspektif

pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan dan dirumuskan bersama oleh seluruh stake holder (masyarakat, pemda, legislatif, LSM, Perguruan Tinggi, wartawan, kalangan swasta dll). Program ini diharapkan dapat menjadi pilihan tepat dan efektif dalam mengelola pembangunan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Namun pelaksanaan program PKP2D tersebut terindikasi belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dengan masih terdapatnya beberapa wilayah produksi pertanian dan perkebunan potensial, yang infrastruktur jalannya masih buruk, disamping itu permasalahan petani terhadap hama dan kualitas produksi masih dilakukan secara parsial oleh petani, begitupun masih terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat yang potensial menimbulkan bencana longsor yang berbahaya terhadap diri dan keluarganya, oleh karena itu perlu dievaluasi sejauhmana penerapan konsep itu dilakukan dan sejauhmana dukungan dan konsistensi masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka kami memilih topik :

**Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana
Perdesaan (PKP2D) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka, permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah ?.
2. Bagaimana pengaruh program PKP2D terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Sinjai Tengah ?.

C. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi sejauhmana konsep perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program terhadap hasil yang dicapai pada pelaksanaan program PKP2D.
2. Untuk menganalisis pengaruh Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Sinjai Tengah.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi diri dan fokus pada pembahasan mengenai evaluasi program PKP2D terhadap kondisi social ekonomi masyarakat yakni: perkembangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan, perumahan, pendidikan, aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat serta perencanaan program, pelaksanaan dan pemeliharaan

prasarana atas pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) di Kecamatan Sinjai Tengah.

Dalam penelitian ini akan dianalisis sejauh mana pengaruh program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.

E. Manfaat.

1. Menemukenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan usaha-usaha sosial ekonomi masyarakat .
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang efektifif kepada pemda dan seluruh stake holder di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkaya ilmu terapan dalam penelitian bagi kalangan akademisi atau peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih detail terhadap pengembangan wilayah .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Umumnya para ahli sependapat bahwa evaluasi adalah upaya untuk mengukur manfaat dari sebuah program, atau untuk mengkaji keberhasilan sebuah program dalam memenuhi tujuannya serta mengukur efisiensi sebuah program dibandingkan dengan program lain. Evaluasi juga mempunyai pengertian sebuah usaha untuk memperkuat atau mengefektifkan sebuah program yang sedang berjalan.

Menurut Ali dan Sirait (1990; 30) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima secara universal.

Menurut Moekijat (2000; 16), evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Yunus (1999;180), pembagian wilayah kota terbagi menjadi tiga bagian yaitu : bagian paling dalam kota, bagian tengah dan bagian paling luar kota.

Miller (1978) melihat untuk tujuan yang lebih spesifik misalnya untuk kegiatan evaluasi pembangunan wilayah maka program evaluasi diartikan ".....the process of assessing a program's accomplishments, describing its methods, and certifying its strength and weaknesses."

Menurut definisi yang diutarakan diatas maka evaluasi meninjau pada hasil dari pengembangan program, selain juga meninjau pada proses bagaimana dan mengapa hasil yang dimaksud dapat terjadi. Tujuan umumnya adalah menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan baik pada saat berlangsungnya sebuah kegiatan atau pada saat berakhirnya sebuah kegiatan. Keputusan yang dihasilkan dari hasil evaluasi sebuah kegiatan antara lain, mengakhirinya, melanjutkan atau memperluas lingkup kegiatan tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan antara lain melakukan penanggulangan khusus untuk meningkatkan kualitas pekerjaan atau memberi penekanan khusus pada satu bagian kegiatan agar memberi pengaruh positif pada kegiatan lain yang berhubungan.

Lebih lanjut Aji dan sirait (1990 :30) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan rencana kegiatan, dan rencana program hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi. Dengan demikian evaluasi haruslah dikembangkan secara melembaga dan membudaya agar pelaksanaan kegiatan, program dan program pembangunan dapat lebih berhasil, bermanfaat dan berdaya guna.

Secara eksplisit pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap-tahap didalam siklus pengelolaan program, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori meliputi :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan didalam tahap perencanaan, dalam rangka mencoba memilih memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metoda-metoda yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda-beda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah tindakan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Evaluasi disini berbeda dengan monitoring atau pengendalian, karena monitoring melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana dan rencana tersebut dianggap sudah tepat untuk dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Sebaiknya evaluasi melihat sejauh mana kegiatan/pelaksanaan program masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah atau apakah pencapaian hasil kegiatan tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang akan dihadapinya.

3. Evaluasi tahap purna pelaksanaan

Pada tahap purna pelaksanaan, evaluasi hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan, perbedaannya yang dinilai dan dianalisis bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana melainkan hasil pekerjaan dibandingkan dengan rencana, yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Sitorus (1985:47) kegiatan utama dalam evaluasi lahan menurut FAO (1976) adalah :

1. Konsultasi pendahuluan meliputi pekerjaan persiapan antara lain penetapan tujuan evaluasi secara jelas, jenis data yang digunakan, asumsi yang digunakan dalam evaluasi, daerah penelitian, serta intensitas dan skala survey.
2. Penjabaran (deskripsi) dari jenis penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan dengan segala persyaratan yang diperlukan.
3. Deskripsi satuan peta lahan (Land Mapping Unit) dan kemudian kualitas lahan (Land Qualities) berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan pembatas-pembatasnya.
4. Membandingkan jenis penggunaan lahan dengan tipe-tipe lahan yang ada. Ini merupakan proses penting dalam evaluasi lahan, dimana data lahan, penggunaan lahan dan informasi-informasi ekonomi dan sosial digabungkan dan di analisis secara bersama-sama.

5. Hasil dari butir 4 adalah klasifikasi kesesuaian lahan.
6. Penyajian dan hasil evaluasi.

Kesimpulan dari pendapat tersebut diatas dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka evaluasi terhadap aktifitas program penguatan kapasitas pengembangan prasarana Perdesaan (PKP2D). yang dimaksudkan sebagai upaya membandingkan antara rencana yang ingin dicapai khususnya terkait dengan peningkatan kegiatan social ekonomi dan pengembangan wilayah dengan hasil yang dicapai.

B. Konsep Pengembangan Wilayah

Dalam studi pengembangan wilayah, secara alamiah terjadi penyebaran potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berbeda antar wilayah. Penyebaran ini disebabkan karena sitiap wilayah mempunyai karakteristkik yang berbeda-beda satu sama lain, yang berimplikasi pada perbedaan tingkat pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah dan menciptakan struktur wilayah baik fisik, ekonomi, tata ruang dan fasilitas produksi yang berpengaruh terhadap pola aliran modal, arus komoditi, arus tenaga kerja dan komunikasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan setiap wilayah mempunyai keragaman.

Wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam studi pengembangan wilayah, pertimbangan produktifitas dan efisisensi dalam melakukan aktifitas produksi, konsumsi dan distribusi merupakan indikator yang perlu diperhatikan dalam megoptimalkan kinerja suatu wilayah.

Menurut Newchon (1985;60), wilayah mempunyai sifat dan karakteristik yaitu :

(i) Wilayah nodal yaitu wilayah yang secara fungsional tergantung antara pusat dan hinterlandnya; (ii) wilayah administratif yaitu wilayah yang batasnya dibuat karena kepentingan politik, pemerintahan dan administrasi; (iii) wilayah homogen yaitu wilayah yang memiliki sifat dan ciri yang sama; (iv) wilayah perencanaan yaitu wilayah karena kebutuhan perencanaan dikelompokkan menjadi satu.

Menurut Chinitz dalam Adisasmita (1994) konsep wilayah mengandung tiga pengertian yaitu : wilayah homogen (homogeneous), adalah wilayah geografi yang dapat menjadi wilayah tunggal apabila wilayah tersebut mempunyai karakteristik ekonomi, sosial budaya, kondisi politik dan sumber daya yang sama; (ii) Wilayah nodal (nodal region) atau wilayah polarisasi (polarization region) adalah wilayah yang terdiri dari wilayah-wilayah yang heterogen seperti terkonsentrasinya kepadatan penduduk, pemusatan sarana dan prasarana yang cukup tinggi; (iii) wilayah perencanaan (planning region) adalah suatu wilayah pengembangan dimana program-program pembanguinan itu dilaksanakan.

Selanjutnya Hoover (dalam Glasson, 1990), mengemukakan bahwa wilayah homogen merupakan wilayah yang dibatasi berdasarkan keseragamannya, dimana keseragaman yang tercipta merupakan keragaman intern (internal uniformity). Sedangkan Allen dan Maclellan (dalam Sukirno, 1985), menyatakan bahwa batas daerah nodal ditentukan sejauhmana

pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hoover (dalam Glasson, 1990), menyatakan bahwa struktur dari daerah nodal dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat satu inti dan beberapa daerah peripheri melingkapi.

Menurut Moekijat (2000; 16), evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah dilakukan sebelumnya.

Dan Klaessen (dalam Glasson, 1990) mengemukakan bahwa wilayah perencanaan antara lain : (i) harus cukup besar dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (ii) harus mampu mensuplai industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang diperlukan, (iii) harus mempunyai struktur ekonomi yang homogen (iv) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point), (v) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, (vi) mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalannya.

Pengertian wilayah juga sering diartikan sebagai suatu daerah administrasi dengan batas-batas tertentu. Sukirno (1985) mengemukakan bahwa pengertian wilayah administrasi (dalam pemerintahan) merupakan pengertian yang paling banyak digunakan, hal ini disebabkan oleh dua faktor yakni (i) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah, (b)

daerah yang batasnya berdasarkan atas satuan administrasi lebih mudah untuk dianalisa. Secara konseptual terdapat beberapa corak kewilayahan yang dapat digunakan sebagai alat operasional dalam memacu perkembangan suatu wilayah. Hal ini menjadi penting khususnya dalam menentukan karakter suatu wilayah yang akan dikembangkan sehingga didapatkan strategi pengembangan yang sebaiknya digunakan. Perbedaan karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadi daya tarik antara wilayah seperti arus manusia, arus modal, arus barang dan jasa. Proses tarik menarik ini berimplikasi pada terbentuknya wilayah-wilayah pusat dan wilayah pinggiran (center-periphery). Wilayah pusat merupakan wilayah yang dalam perkembangannya lebih banyak menyerap sumber daya yang ada disekelilingnya, sedangkan wilayah yang terisap sumberdayanya adalah daerah peniggiran. Menurut Fredman dan W. Alonso dalam Adisasmita (1994) mengklasifikasikan wilayah menjadi empat kategori yaitu : (i) metropolitan region, atau wilayah inti (core region), merupakan pusat pertumbuhan dengan kelengkapan fasilitas dan kegiatan yang sangat kompleks, (ii) Development axis, adalah wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi, (iii) frontier region adalah wilayah-wilayah perbatasan yang diarahkan untuk menjadi daerah yang belum terolah (virgin areas) dan Depressed regiop wilayah.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kemampuan perkembangan setiap wilayah, maka B. Okun dan R.W Richadson dalam Adisasmita (1994) membuat klasifikasi wilayah berdasarkan kriteria tersebut

menjadi : (i) low per capita income and stagnan regions (LS), adalah wilayah yang pendapatan perkapita rendah, (ii) high percapita income and stagnant regions (HS), adalah wilayah dengan pendapatan perkapita tinggi tetapi kurang berkembang, (iii) adalah wilayah dengan pendapatan perkapita rendah tetapi berkembang, dan (iv) High percapita income and growing regions (HG) adalah wilayah yang pendapatan perkapita tinggi dan berkembang.

Strategi pengembangan wilayah merupakan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan di daerah. Sehubungan dengan pembangunan daerah, maka Kadariah (1985), mengemukakan bahwa pengembangan regional biasanya karena kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan menghasilkan keuntungan kompetitif dari daerah lainnya. Keunggulan kompetitif dari suatu daerah menyebabkan terjadi dua proses dalam pengembangan suatu wilayah yaitu "backwash" dan "spread" effect. Backwash effect merupakan pengurasan wilayah terbelakang oleh wilayah yang maju, sedangkan spread effect adalah perkembangan wilayah belakang yang terdorong karena adanya hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakang. Menurut pengamatan Rondonelli dan Ruddle bahwa gejala yang terjadi di negara sedang berkembang adalah pola backwash effect selalu lebih besar dari spread effect maka diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah (Anonim, 1986:73).

Guna mendukung perkembangan suatu wilayah setidaknya ada tiga komponen utama pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan, yaitu ; (i) sumberdaya penduduk, (ii) kegiatan ekonomi, dan (3) system transportasi (A. Karlqvist dalam Adisasmita, 1994). Ketergantungan antara ketiga komponen tersebut memainkan peranan yang fundamental dalam menata struktur suatu wilayah. Keterkaitan antara penduduk dan kegiatan ekonomi ditinjau dari segi produksi dan konsumsi menghasilkan lapangan kerja, upah buruh, tabungan masyarakat dll.

C. Konsep Pembangunan Kawasan dan Strategi Pengembangannya

Meskipun peranan tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan sangat penting sebagai faktor lokasional yang menentukan keberhasilan pembangunan kegiatan usaha, namun fungsi tertentu dan besaran tata ruang yang lebih luas telah mendapat perhatian yang diharapkan mampu menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan dalam berbagai sector.

Dalam pengembangan wilayah dilakukan perencanaan alokasi penggunaan tata ruang wilayah yang berfungsi memberikan arahan lokasi fungsi yang dominan dan non dominan menurut kawasan pengembangan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan tata ruang wilayah dalam hubungannya dengan pemanfaatan peningkatan produktifitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan.

Kawasan pengembangan dominan dirinci menurut bentuk pemanfaatannya yaitu :(Adisasmita, 2007).

1. Kawasan lindung (kawasan non budidaya), kawasan penyangga (kawasan budidaya terbatas), kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non pertanian.
2. Kawasan lindung dapat berfungsi hutan lindung, jalur pengamanan aliran sungai, pelindung mata air dan sebagainya. Kawasan penyangga dapat berfungsi hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas, tanaman hutan.
3. Kawasan budidaya pertanian dapat berfungsi hutan produksi, tanaman tahunan, pertanian/ tanaman lahan kering, pertanian/ tanaman lahan basah.
4. Kawasan budidaya non pertanian dapat berfungsi pemukiman, industri, pertambangan, penggunaan khusus dan lain-lain.
5. Kawasan pengembangan non dominan dimana dapat berfungsi sebagai kawasan lindung (kawasan budidaya terbatas), kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non pertanian.

Selain dari konsep pengembangan yang dominan dan non dominan, dikenal pula istilah kawasan andalan dan kawasan strategis.

Beberapa ciri penting kawasan andalan dalam pengembangan wilayah meliputi (i) tingkat aglomerasi penduduk dan kegiatan ekonomi relatif tinggi (ii) tingkat ketersediaan infrastruktur relatif memadai (iii) memiliki sector

unggulan yang prospektif untuk dikembangkan (iv) memiliki sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi.

Sedangkan kawasan strategis memiliki ciri-ciri (i) Mempunyai kontribusi peningkatan ekspor non migas (ii) dampak peningkatan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas keamanan berkaitan dengan penyediaan lahan skala besar, seperti pemukiman penduduk, kawasan industri, pencetakan sawah dan menarik investasi (iii) mendorong pembangunan wilayah terbelakang, miskin, kritis dan terisolasi. (Kuncoro Mudrajad, 2008).

D. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan pengembangan strategis adalah kawasan pengembangan yang mempunyai sumber daya yang produktif untuk dikembangkan baik tingkat regional maupun nasional, aglomerasi regional, posisi strategis dan mempunyai implikasi terhadap pengembangan regional dan nasional. (Kuncoro Mudrajad, 2008).

Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografi yang terintegrasi dengan faktor terkait, dimana batasan sistem tersebut ditentukan oleh basis administrasi dan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi daerah itu. Kawasan pengembangan strategis juga meliputi area pertumbuhan dan perbatasan potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda sehingga dapat dikembangkan secara efektif.

1. Metode,

Dalam menentukan lokasi kawasan Pengembangan Strategis digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai referensi utama, termasuk tantangan pengembangan nasional, isu pengembangan (development), dan mekanisme pasar. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjelasan berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 47/1997 (dalam tahap revisi), merupakan acuan utama dalam menentukan Kawasan Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Strategis.
- b. Dengan memperhatikan tantangan pengembangan nasional, penentuan kawasan Pengembangan Strategis turut dimasukkan dalam tren globalisasi, kerjasama antar kawasan, implementasi otonomi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan berbagai macam kepentingan dalam pengolahan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.
- c. Memperhatikan perbedaan tingkat pengembangan kawasan baik dalam pengaturan maupun pengembangan sumber daya alam tiap daerah.
- d. Mekanisme pasar turut menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis, dimana hal ini dapat merupakan instrument kebijakan dalam mengarahkan investasi daerah mendukung pengembangan kawasan.

2. Kriteria

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa faktor penting dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis adalah posisi

geografis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur dan keterkaitan inter-regional.

a. Lokasi Geografi.

Kriteria ini merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam lokasi pusat pasar domestic maupun internasional. Demikian halnya dengan lokasi sumber daya alam yang menghasilkan proses produksi lebih lanjut dan dapat meminimalkan biaya transportasi.

b. Sumber Daya Alam

Kriteria ini ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi Kawasan pengembangan strategis.

c. Infrastruktur Regional

Faktor ketiga ini penting untuk menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam kawasan yang mempunyai infrastruktur regional potensial yang mendukung sector produksi, pasar domestic dan internasional dan kawasan pedalaman.

d. Keterkaitan Antar-Regionanl

Faktor ini merupakan kriteria untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang memerlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. Trckle Down Effect (efek menetes ke bawah) dimungkinkan dapat terjadi.

3. Lokasi

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, lokasi Kawasan Pengembangan Strategis yaitu wilayah Kabupaten yang dibagi menurut kawasan sesuai karakteristik wilayah, potensi dan aksesibilitas terhadap pasar yang dituju.

4. Orientasi

Terdapat dua orientasi dalam menentukan lokasi Pengembangan Kawasan Strategis; Orientasi keluar (Ekspor) dan Orientasi ke dalam (perdagangan antar kawasan domestik).

Dalam menentukan lokasi tersebut, orientasi pasar global (seperti Uni Eropa, Apec, Timur Tengah, Afrika dan Afrika Selatan) turut dimasukkan dalam menentukan Pengembangan Kawasan Strategis.

5. Metode Cluster

Metode cluster menjadi gambaran utama dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis, dengan menentukan beberapa daerah prioritas berdasarkan RTRWN. Metode ini memerlukan kajian yang mendalam terutama dalam kaitannya dengan unit analisis yang tidak berdasarkan pada batas administrasi seperti batas provinsi atau kabupaten/kota. Cara ini tidak memperhitungkan pendekatan administrasi dan dipandang sebagai pendekatan fungsional dari daerah yang didesain.

6. Pengembangan SREC

Konsep Pengembangan Kawasan Strategis yang berdasarkan cluster daerah prioritas dapat dikembangkan secara ekonomi sebagai acuan dalam

pengembangan daerah kerja sama ekonomi sub-regional (Sub Regional Economic Cooperation/SREC). SREC telah dipromosikan sejak awal 1990-an melalui *skema segi tiga* pertumbuhan

Perbandingan antara SREC, KAPET, Kawasan Pengembangan Strategis, Zona industri, Zona Terikat, Zona Perdagangan Bebas dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel. 1 Analisis Komparatif Strategi & Kebijakan Pembangunan Regional (Kuncoro, M. 2008)

No	Karakteristik	Zona			KAPET	SREC	Kawasan Pengembangan Strategis
		Terkait	Industri	Perdagangan bebas			
1	Tujuan	ekspor	Pengembangan industri	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pertumbuhan Ekonomi Regional	Kerjasama Regional & Internasional	Kesejahteraan Nasional, disparitas inter-regional, pembangunan berkelanjutan
2	Lingkup Regional	Lokal	lokal	Kota/pulau	Pemerintahan multi lokal	Negara anggota sub-regional	Multi propinsi dan daerah, orientasi ke dalam dan ke luar
3	Aktivitas Utama	Pengapalan Manufaktur	Manufaktur	Multi sektor	Multi sektor	Multi sektor	Komoditi prioritas, industri berbasis teknologi, UKM
4	Dukungan Pemerintah Pusat	Fasilitas ekspor Tax holiday	Fasilitas perizinan	Infrastruktur dasar Fasilitas pajak	Dana operasional Fasilitas perizinan	Fasilitas pajak Fasilitas ekspor Fasilitas perizinan	Fiskal/moneter, investasi, perdagangan, transportasi, infrastruktur daerah

Sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu kabupaten, kawasan andalan memiliki faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi atas komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (technogical progress) (Todaro 2000:115).

Penciptaan peluang investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sector unggulan yang dimiliki oleh kawasan bersangkutan. Sektor/sub sector unggulan yang diukur dengan analisis location Quotient (LQ) memiliki kesamaan dengan sector ekonomi basis, dimana pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu sedangkan aktivitas lain (non basis) merupakan konsekwensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Soepono, 2000, 41-53; Hoover, 1971). Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri dari aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja basis yang menjadi tumpuan perekonomian. Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sector basis.

Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan andalan relevan dengan teori pusat pertumbuhan Perroux (1975) yang mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi diberbagai tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Dalam kaitannya dengan sector unggulan Perroux mengatakan bahwa industri unggulan (Lindustrie matriks) merupakan penggerak utama dalam

pembangunan daerah, dan adanya sector/ industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan pekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perokonomian merupakan gabungan dari system industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari system industri yang relative aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relative pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah relative maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relative pasif (Arsyad, 1999;147-148).

E. Indikator Ekonomi dan Sosial Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) diukur dengan kenaikan pendapatan daerah perkapita atau produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita. daerah tersebut dapat merupakan propinsi atau kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah, peningkatan ini meliputi kapasitas / volume produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat pula dinyatakan sebagai peningkatan sejumlah komoditas yang dihasilkan disuatu daerah (wilayah). Konsep ini menyangkut pengaruh yang luas misalnya dibidang perdagangan, yaitu dapat diperoleh suplay komoditas dalam jumlah yang lebih besar melalui pertukaran antar daerah yang menggunakan fasilitas transportasi, jasa perdagangan dan jasa pengangkutan (Adisamita, 2007).

Pembangunan ekonomi (economic development) adalah suatu konsep yang lebih luas, mencakup pula modernisasi lembaga yang bersifat ekonomi yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara produktif dan efisien sehingga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Kelembagaan adalah suatu sarana untuk bertindak dan berfikir yang merujuk pada organisasi masyarakat dan pada sikap orang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Kelembagaan dengan ekonomi produksi berkaitan dengan cara memadukan berbagai sumber daya untuk memproduksi barang-barang tertentu.

Modernisasi kelembagaan mengacu pada penyesuaian dengan cara baru tentang pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan lainnya secara lebih rasional yang sangat berbeda dengan cara tradisional atau sudah biasa diterapkan.

Pertumbuhan ekonomi modern merujuk pada pengalaman lalu yang dialami oleh negara maju yang memperlihatkan gambaran perkembangan sebagai berikut (Adisamita, 2007) : (i) kenaikan output perkapita, (ii) pertumbuhan jumlah penduduk, (iii) pola kemajuan teknologi yang mantap (iv) kenaikan cadangan modal netto yang mantap (v) terus berkembangnya upah nyata, (vi) tingkat perubahan struktur ekonomi yang tinggi, (vii) perubahan social dan berbagai sector non ekonomi lainnya.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan suatu daerah, salah satu diantaranya adalah konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross National Product (GNP) yang merupakan nilai seluruh produksi dalam suatu negara/wilayah dari seluruh sector kegiatan ekonomi.

Dalam pembangunan regional, perencanaan sub sistem dari ekonomi nasional adalah merupakan prasyarat. Suatu daerah (wilayah) dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan daerah (wilayah) lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komoditas. Dalam proses pembangunan ekonomi akan terjadi peningkatan dalam volume produksi, sumberdaya pembangunan, pendapatan perkapita, infrastruktur dan sosial, perbaikan sistem transportasi, penurunan biaya produksi dan sebagainya.

a. Indikator ekonomi

Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi wilayah dapat dikemukakan yaitu pendapatan regional perkapita, (kesenjangan /ketimpangan) pendapatan, perubahan struktur perekonomian melalui pendekatan sector, struktur industri, pertumbuhan kesempatan kerja dan tingkat penyebaran kemudahan.(Adisasmita, 2007)

1. Pendapatan regional perkapita.

Salah satu konsep paling penting dalam pembangunan ekonomi regional adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai seluruh produksi dari seluruh kegiatan sektoral dalam suatu daerah. PDRB dapat dihitung dengan pendekatan arus barang dan jasa penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan diperoleh pendapatan regional. Selanjutnya pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah sama dengan pendapatan Regional per pakapita suatu daerah.

2. Kesenjangan Pendapatan

Perkembangan pola kesetimbangan negara-negara yang berkembang menuju permulaan pembangunannya sampai menjadi negara maju menunjukkan ketidakseimbangan yang tinggi untuk kemudian menjadi lebih kecil. Di negara-negara dengan pendapatan rendah terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar, dimana dalam masyarakat terdapat mereka yang sangat kaya di samping mereka yang sangat miskin.

3. Perubahan Struktur Perekonomian melalui pendekatan sektor

Berdasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam pertanian, dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sekunder) dan kemudian dalam industri-industri jasa (tersier).

Menurunnya sumbangan sektor pertanian dan meningkatnya sumbangan sektor industri mencerminkan perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang dan kokoh, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

4. Struktur Industri

Interprestasi pertumbuhan daerah dapat dikaitkan pula dengan struktur industrinya. Argumentasinya adalah kerangka dasar analisis pertumbuhan regional, lokasi industri dilihat dalam konteks yang komprehensif dan konsisten untuk memahami dan mengevaluasi pembangunan ekonomi sub-nasional. Asumsi yang digunakan adalah

pertumbuhan regional secara overall (volume kegiatan ekonomi) ditentukan oleh konstelasi kekuatan yang berbeda dari pada pendapatan per kapita (aspek kesejahteraan dari pertumbuhan); pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu proses evolusioner dimana sukses pembangunan masa depan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan masa lalu dan sekarang, dan faktor-faktor kritis/penting dalam merubah pola pertumbuhan regional adalah pengambilan keputusan lokasi dan output dari perusahaan-perusahaan industri yang mempertimbangan persyaratan input dan pasar.

5. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah mendesak dalam rangka pembangunan Indonesia karena mencakup secara langsung usaha pencapaian Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mempengaruhi tingkat pengangguran.

6. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya sandang, pangan, memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya), maupun kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong, suku cabang, listrik, air, dan jasa-jasa seperti angkutan, pemasaran, dan perbankan).

Poernomosidi Hadjisarosa (mantan Menteri PU, 1978-1983) berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu wilayah adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria pendapatan daerah (per kapita) sangat sukar untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain dari pada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, pendapatan tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.

Dari segi metodologisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada konsep ekonomi (PDRB) dan menafsirkan pertumbuhan sesuatu daerah menurut dinamikanya (struktur industri). Indikator-indikator tersebut adalah komplementer.

b. Indikator Sosial

Untuk mengukur pengaruh sosial terhadap kegiatan pembangunan, diperlukan parameter tertentu berupa indikator untuk mengukur besaran pengaruh yang dapat dilakukan melalui metode pendekatan sebagai berikut : (Adisasmita, 2007).

1. Perkembangan Indikator Sosial

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan pada masa lalu telah menunjukkan keberhasilan yang positif di berbagai bidang (baik ekonomi maupun sosial). Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia (improving quality of life), sering disebut kesejahteraan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan diperlukan tolok ukur atau indicator yang tepat dan rinci.

Dalam bidang social, salah satu alternative ukuran pembangunan yang menjadi cakupan indicator meliputi 10 indikator (Indikator kesejahteraan Rakyat (1980-1981) : (i) Penduduk, (ii) keluarga berencana, (iii) Migrasi, (iv) Pendidikan, (v) Sosial budaya, (vi) Kesehatan, (vii) Gizi), (viii) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, (ix) Kemanan dan ketertiban masyarakat dan (x) Lingkungan hidup dan perumahan.

2. Kegunaan Indikator

Salah satu kegunaan terpenting dari suatu indikator kesejahteraan rakyat adalah untuk membandingkan tingkat kesejahteraan beberapa kelompok masyarakat baik menurut golongan, daerah maupun waktu.

Hasil pengukuran ini haruslah merupakan hal yang sederhana, dan mudah diartikan, sehingga mereka segera dapat membaca keadaan kesejahteraan pada suatu daerah dan membuat evaluasi.

Faktor kesejahteraan rakyat suatu daerah (kabupaten/ kecamatan/ desa) dapat merupakan masukan bagi penentu kebijakan guna melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu indikator yang disusun haruslah memiliki keabsahan sebagai ukuran dan berasal dari data yang dapat dipercaya.

3. Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya potensi dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam menangani dan menurunkan permasalahan sosial, meningkatnya mutu pelayanan dan tersedianya kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial dan fasilitas umum.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

- i. Pemberdayaan, peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang pada masyarakat.
- ii. Kemitraan, kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal Sulawesi Selatan antara pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- iii. Partisipasi, prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
- iv. Desentralisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai karakteristik sosial budaya setempat dan pelaksanaannya dilakukan secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan pembangunan. Secara umum indikator-indikator kunci pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi ;(1) indikator ekonomi, (ii) indikator sosial. Kedua indikator ini penting karena selain mampu menjelaskan kemajuan ekonomi secara luas (tingkat pendapatan, inflasi, investasi dan lain-lain), juga mampu menempatkan permasalahan sosial sebagai parameter dalam pembangunan seperti, akses terhadap kesehatan, pendidikan dan kemudahan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi, kesempatan kerja dan lain-lain.

Penempatan indikator sosial ekonomi dalam melihat proses pembangunan merupakan suatu koreksi, bahwa pembangunan mempunyai dimensi yang lebih penting dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Menurut Dudley Seers dalam Mudrajad.K (1997), menyatakan bahwa pembangunan setidaknya merupakan upaya untuk meniadakan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Sedang Todaro (1989) lebih menekankan terhadap pencapaian pembangunan yang membuat manusia lebih berharga, dengan memperhatikan 3 (tiga) nilai dasar pembangunan yaitu : (i) life sustenance, kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, (ii) self-esteem, kebutuhan untuk dihargai, (iii) freedom, kebutuhan kebebasan. Strategi ini mencoba untuk memasukkan "jaminan" agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mampu mendapat manfaat dari setiap program pembangunan. Menurut Mudrajad K. (1997) ada 4 (empat) paradigma pembangunan yang harus diperhatikan guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi suatu negara yaitu :

1. Strategi pertumbuhan dengan distribusi, yaitu mendistribusikan pertumbuhan secara adil dan merata pada setiap masyarakat seperti, investasi modal manusia, kesempatan kerja, perhatian pada petani dan lain-lain.
2. Strategi kebutuhan pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok mencakup kebutuhan minimum konsumsi (pangan, sandang, perumahan), dan jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air bersih dan fasilitas pendidikan).
3. Strategi pembangunan mandiri, yaitu menekankan pada usaha-usaha mandiri tanpa bantuan dengan pihak luar.
4. Strategi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menekankan bahwa masyarakat dan ekosistem disuatu wilayah harus berkembang bersama-sama menuju produktifitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, baik segi sosial maupun ekologi.

Menurut Gaus (2001) peningkatan aspek sosial ekonomi memberikan gambaran terhadap tingkat kesejahteraan ataupun tingkat pendapatan masyarakat, jenis atau keragaman pencaharian yang ditekuni, dan upaya-upaya individu dan kelompok dalam meningkatkan kesejahterannya. Sejalan dengan hal tersebut Roucek dan Warren (1984), menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi seseorang dapat ditentukan lewat kegiatan ekonomi yang dilakukan, jumlah pendapatan yang diperoleh, jenis pendapatan yang diperoleh, jenis pekerjaan yang ditekuni, pekerjaan formal, pemilikan barang dan kepemilikan tanah.

Guna mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar bila tidak didukung oleh prasarana sosial ekonomi yang baik.

Setiap aspek kehidupan sosial ekonomi mempunyai prasarana tersendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Menurut Jayadinata J.T (1986), mengemukakan bahwa prasarana sosial ekonomi pada suatu wilayah dapat dibedakan menjadi :

1. Prasarana menurut bentuk

- a. Berbentuk ruang dan bangunan yang terbagi atas, (I) perlindungan yaitu rumah, (2) pelayanan umum yaitu prasarana kesehatan, pendidikan dan lain-lain, (iii) kebudayaan yaitu lapangan olah raga, tempat rekreasi dan lain-lain.
- b. Berbentuk jaringan yang terbagi atas (i) system pengangkutan, jaringan jalan, rute angkutan umum, dan lain-lain, (ii) utilitas umum (public utility) seperti jaringan listrik, jaringan air minum, (iii) system pengairan irigasi seperti, bendungan dan salurannya, jaringan selokan, (iv) jaringan komunikasi seperti, jaringan telepon, daya tangkap siaran tv dan lain-lain.

2. Prasarana menurut fungsi (peran), menunjukkan nilai ambang yang berarti jumlah minimal produk yang diperlukan untuk menunjang suatu fungsi prasarana sosial ekonomi agar dapat berjalan lancar. Misalnya suatu prasarana akan relative lebih tinggi fungsinya harus terletak pada

wilayah yang jangkauan pelayanannya lebih luas. Prasarana tersebut harus berfungsi untuk melancarkan perkembangan aktivitas sosial ekonomi. Menurut fungsinya prasarana dimaksud terbagi atas prasarana sosial dan prasarana ekonomi.

Selanjutnya Amien (1996), mengemukakan bahwa indikator sosial ekonomi adalah mengukur secara langsung maupun tidak langsung tingkat pemenuhan dasar manusia seperti ; keadaan perumahan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesempatan kerja dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum dan sumber-sumber informasi.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997), indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi ; (i) indikator ekonomi, (ii) indikator sosial.

Variabel yang termasuk dalam indikator ekonomi adalah :

- a. GNP (Gross National Product) per kapita, adalah produk nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
- b. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi perhitungan seluruh kegiatan ekonomi yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara.
- c. GDP perkapita dengan Purchasing Power Parity, adalah suatu alat konversi untuk menentukan jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di pasar domestic yang sama dengan daya beli suatu dollar di AS.

Sedangkan yang termasuk variable sosial adalah :

- a. Indeks Mutu Hidup Physical Quality Life Index (PQLI) alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian dan tingkat melek huruf.
- b. Human Development Indeks (HDI) merupakan suatu upaya dari UNDP (United Nation Development Program) untuk melihat status pembangunan sosial ekonomi pada suatu negara secara sistematis dan komprehensif. Penyusunan ranking Human Development Indeks suatu Negara berdasarkan atas tiga tujuan atau produk pembangunan, yaitu, (i) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, (ii) pengetahuan yang diukur dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (iii) penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi local.

Bertitik tolak dari beberapa pendapat tentang fenomena sosial ekonomi sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan, tergambar bahwa variabel-variabel sosial ekonomi dalam pembangunan mempunyai dimensi yang sangat luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha mengadopsi beberapa variable yang diasumsikan mempunyai korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang berada di lokasi penelitian adalah :

1. Pengaruh sosial yang terdiri dari; (i) pendidikan dengan variable jenjang pendidikan yang ditamatkan, pandangan responden terhadap pentingnya pendidikan, (ii) derajat kesehatan dengan variable frekwensi gangguan

kesehatan, tempat pengobatan yang dikunjungi dan (iii) kondisi pemukiman dengan variable keadaan perumahan, ketersediaan air bersih.

2. Pengaruh ekonomi yang terdiri dari : (i) peningkatan pendapatan masyarakat dengan variable konversi jumlah konsumsi beras pertahun, (ii) peningkatan jumlah jenis usaha dengan variable jumlah jenis usaha, dan (iii) peningkatan jumlah investasi dengan variable keinginan untuk menabung, peningkatan luas lahan dan penambahan peralatan produksi.

F. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Strategi Pengembangannya

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Goulet (1971), paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jatidiri (self esteem), serta kebebasan (freedom) Todaro 2000.

Ketiga komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kecukupan, menyangkut semua yang merupakan kebutuhan dasar (basic needs), yaitu segala sesuatu jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu diantara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka memunculkan kondisi keterbelakangan absolut.

- b. Jatidiri, yaitu adanya dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk lebih maju. Untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa pantas dan layak melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu, atau hal-hal lain yang menyangkut pencarian jatidiri seseorang. Oleh Goulet (1971), dikatakan bahwa pembangunan itu harus diabsahkan sebagai suatu tujuan karena merupakan kunci untuk meraih sesuatu yang sangat penting, dan hal itu bukan kekayaan melainkan jatidiri.
- c. Kebebasan atau kemerdekaan disini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Memiliki kebebasan berarti untuk selamanya mampu berpikir jernih untuk menilai segala sesuatu atas dasar pikiran sehat, keyakinan dan hati nurani sendiri. Konsep kebebasan manusia juga meliputi kebasan berpolitik, privasi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan paling tidak harus didasari pada tiga nilai inti, yakni : Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan papan, kesehatan, keamanan; jatidiri yaitu kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya; dan kebebasan yaitu kemampuan untuk memilih atau bebas dari sikap menghamba. Ketiga nilai inti keberhasilan pembangunan ini tidak lain merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dengan berbagai upaya untuk mencapai suatu komunitas masyarakat dalam suatu wilayah.

Menurut Amien (1996), tingkat perkembangan unit wilayah dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti : keadaan perumahan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesempatan kerja dan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan umum dan sumber-sumber informasi. Pada dasarnya ada tiga sasaran pembangunan wilayah yaitu : sasaran pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan ekonomi mutlak diperlukan karena selain merupakan sasaran umum pada setiap pendekatan perencanaan pembangunan, juga merupakan syarat bagi keberhasilan pencapaian kedua sasaran pembangunan lainnya. Tanpa keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi sulit dicapai keberhasilan pembangunan sosial, demikian pula kegagalan dalam pembangunan ekonomi sering menjadi pemicu bagi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya dikatakan bahwa keberhasilan setiap program pembangunan perlu dikaji seberapa jauh program tersebut memberikan kontribusi dan mendorong laju pembangunan ekonomi dan sosial wilayah. Pembangunan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kuantitas indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, seperti PDRB, pendapatan perkapita dan sebagainya, disisi lain adanya pergeseran struktural yang mengarah pada tercapainya kondisi kehidupan ekonomi yang berkeadilan sosial. Pembangunan di bidang sosial diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan dua parameter; yaitu (i) kualitas hidup yang diukur dengan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kesempatan untuk menikmati fasilitas sosial ekonomi yang ada, (ii) kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan dan mengolah sumberdaya alam, dengan parameter seperti kemudahan memperoleh informasi atau hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan perangkat produksi untuk mencapai tujuan dan standar kebutuhan dasar. (Amien, 1996)

2. Strategi Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah

Tukiyat (2002), mendefenisikan pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi, sistem masyarakat/sosial, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang akan diambil haruslah bersandar pada potensi, kondisi, struktur dan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Adapun strategi yang digunakan dapat ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu strategi dari sisi permintaan, strategi sisi penawaran dan strategi pengembangan area pelayanan.

a. Strategi sisi Permintaan (Demand side strategi)

Sisi permintaan merupakan suatu strategi pengembangan ekonomi wilayah dengan berorientasi pada permintaan lokal atas barang dan jasa.

Meningkatnya permintaan akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pada gilirannya proses multiplier effect ini akan mendorong pertumbuhan wilayah. Penerapan strategi sisi permintaan dapat ditempuh dalam beberapa tahap yaitu :

- i. Tahap sub - sub sistem, strategi pada tahap ini, pemerintah perlu mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat setempat yang belum mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari hasil pengelolaan sumberdaya alamnya.
- ii. Tahap subsistem, pada kondisi ini strategi yang ditempuh adalah bagaimana mengupayakan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik dengan menggunakan sumber daya lokal melalui subsidi untuk mendorong dinamika perekonomian yang lebih kondusif.
- iii. Tahap surplus pasar (markettable surplus), pada tahap ini pengelolaan sumberdaya lokal bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi sudah ada surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Adanya akses pasar akan memacu masarakat untuk membeli barang sekunder dan tersier. Strategi yang ditempuh pada kondisi ini adalah pengembangan industri berbasis bahan baku hasil pertanian.

- iv. Tahap industri pertanian. Perkembangan Industri pertanian akan dapat menaikkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani akan mendorong pertumbuhan permintaan lokal terhadap barang dan jasa. Strategi yang ditempuh pada tahap ini adalah pengembangan industri non pertanian.
- v. Tahap perkembangan industri non pertanian, dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa non pertanian, maka keragaman produk akan semakin kompleks dan semakin baik kualitasnya. Strategi pengembangan wilayah yang ditempuh pada tahap ini adalah pengembangan industri pengolahan (manufaktur).
- vi. Tahap industrialisasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan barang tersier dalam suatu wilayah, maka perkembangan sektor industri akan mengarah ke skala usaha yang lebih besar.
- vii. Tahap berkembangnya sektor jasa. Dalam tahap ini, masyarakat sudah mempunyai informasi yang merata. Dengan adanya perkembangan perekonomian yang sudah maju, maka pola-pola kehidupan masyarakat semakin kompleks. Dalam kondisi ini peranan jasa sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus informasi. Strategi yang ditempuh adalah pengembangan jaringan sistem informasi.

Pola pengembangan wilayah melalui strategi sisi permintaan pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya memerlukan transformasi teknologi, struktur kelembagaan dan perubahan pola pikir masyarakat secara dinamis. Strategi

sisi permintaan yang mengandalkan kekuatan pasar dan produk lokal, pada dasarnya merupakan suatu strategi pengembangan yang relatif stabil karena faktor-faktor eksternal pada umumnya tidak berpengaruh secara signifikan.

b. Strategi sisi penawaran (Supply side strategi)

Strategi sisi penawaran merupakan strategi pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas tertentu yang diproses dari sumberdaya lokal. Dengan adanya kegiatan ekspor ke luar wilayah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

c. Strategi pengembangan area pelayanan.

Kedua strategi diatas pada dasarnya bersandar pada pengembangan sumber daya alam. Secara konseptual, bagi wilayah-wilayah miskin akan sumberdaya alam, penerapan kedua strategi tersebut akan mengalami kesulitan dan menimbulkan masalah dalam pengembangannya. Karena itu strategi lain yang bisa ditempuh suatu wilayah yang miskin sumberdaya alamnya, yakni strategi pengembangan area pelayanan. Dalam strategi ini diperlukan adanya subsidi pemerintah untuk meningkatkan location rent. Misalnya dengan dibangunnya prasarana dan sarana ekonomi, dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah itu terhadap pusat-pusat pertumbuhan atau ke fasilitas pelayanan lainnya.

Menurut Tikson (2003), makna penting dari pembangunan, baik level makro (nasional), maupun mikro (community/group), yang terjadi pada semua aspek dan level kehidupan masyarakat adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress) yaitu dapat diidentifikasi melalui adanya peningkatan dalam rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi dan efisiensi, pertumbuhan (growth) yang identik dengan kemajuan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari kenaikan produktifitas yang berkelanjutan dan diikuti diversifikasi/ diferensiasi (divercification/differentiation) yang ditandai dengan adanya keanekaragaman kegiatan perekonomian atau produk yang dihasilkan dalam suatu komunitas masyarakat.

G. Pembangunan Wilayah Pedesaan

Menurut Singh (1996), pembangunan wilayah pedesaan diartikan sebagai pembangunan pada seluruh kawasan pedesaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui suatu proses pengembangan sumberdaya alam dan manusia, teknologi, fasilitas dan lembaga organisasi yang ada di pedesaan, serta kebijaksanaan dan program pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan pedesaan juga diartikan, segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan strategi yang memungkinkan sekelompok tertentu orang miskin di pedesaan memperoleh kebutuhan hidup

bagi diri dan keluarganya atau lebih dari yang mereka butuhkan. Hal ini menyangkut pula bagaimana membantu kaum miskin untuk dapat mencari kemungkinan tambahan nafkah di daerah pedesaan (Chamber, 1988 dalam Halik, 1998).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sasaran dari pembangunan pedesaan tersebut adalah :

- a. Ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas distribusi faktor-faktor pendukung kelangsungan hidup, seperti : makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan rasa aman.
- b. Ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan termasuk kemampuan atau daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, budaya dan kemanusiaan.
- c. Memperluas ruang lingkup pilihan-pilihan sosial dan ekonomi setiap individu dengan membebaskan mereka dari ketergantungan dan ketertekanan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pedesaan, dibutuhkan strategi pembangunan pedesaan dengan fokus diarahkan untuk menciptakan disain untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah pedesaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan seoptimal mungkin sumberdaya lokal yang ada, hal ini diawali dari kemauan si miskin itu sendiri untuk melakukan perubahan, dengan kata lain , bahwa kunci untuk mengatasi rakyat dari kemiskinan

berada pada kekuatan rakyat itu sendiri, maka ini tidak lain berarti bahwa dengan upaya yang mengutamakan atau memberdayakan masyarakat (Latief dan Suratingsih, 1994).

Pembangunan pedesaan seharusnya lebih diarahkan pada pembangunan sektor pertanian, sebab sektor inilah yang mendominasi kegiatan perekonomian rakyat di pedesaan; (Johnson (1985). Disarankan untuk mengaplikasikan program pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk :

- a. Mengurangi atau menghilangkan kekurangan bahan pangan di berbagai pelosok pedesaan yang selama ini terus meningkat.
- b. Mengurangi ketiadaan lapangan kerja di pedesaan.
- c. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka diusulkan suatu strategi pembangunan pedesaan terpadu dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- (i). Harus mengarah pada kelompok target yaitu kaum miskin di pedesaan. (ii) Program pembangunan pedesaan terpadu diterapkan pada aspek pertumbuhan dan distribusi produksi nasional dengan mempertimbangkan faktor wilayah, yaitu memilih lokasi yang tepat, (iii) Pembangunan pedesaan harus mengutamakan kemandirian, artinya harus mengandalkan kemampuan sendiri.

Khairuddin (2000), melihat adanya perbedaan kondisi antar desa ditinjau dari aspek geografis, sosial budaya, perekonomian dan tingkat kemajuan, kondisi demikian akan mempengaruhi akselerasi perubahan kondisi yang terdapat di desa tersebut. Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa perlu diadakan pendekatan yang proporsional, sehingga benar-benar sesuai dan efektif.

Beberapa alternatif pendekatan yang sering digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah ; pendekatan komprehensif, pendekatan integral, pendekatan organis, pendekatan selektif, pendekatan pertumbuhan, pendekatan ekologi, pendekatan regional dan pendekatan partisipatif.

Beberapa model pendekatan pembangunan masyarakat yang relevan dengan kondisi alam dan sosial budaya di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaetn Sinjai antara lain :

a. Pendekatan organis

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan sumber-sumber potensial yang terdapat di wilayah bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pokok masyarakat.

b. Pendekatan regional (wilayah)

Pentingnya pendekatan regional adalah untuk menghindari terjadinya pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan terhadap daerah sekitar, dimana pembangunan itu dilaksanakan. Pengaruh tersebut dapat berupa aspek fisik, misalnya :pembangunan pabrik di hulu sungai dengan

membuang limbah ke sungai yang dapat menimbulkan pencemaran pada beberapa desa disekitarnya maupun daerah hilir yang menjadi daerah aliran sungai itu, sehingga harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan pengelola pabrik. Dengan pendekatan regional, daerah-daerah yang dilalui oleh aliran sungai tersebut harus masuk ke dalam suatu perencanaan pembangunan regionalnya dan tidak hanya memperhitungkan wilayah administrasinya saja.

Demikian halnya dengan aspek sosial budaya, dalam pembangunan fasilitas prasarana suatu daerah jelas akan memiliki pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yang dengan cepat mengubah sikap dan tata hubungan masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang menggunakan pendekatan regional, tidak hanya memikirkan perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi pada pusat pembangunan saja, tetapi juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada daerah sekitarnya, baik sebelum dan selama keberdaan serta selesainya program tersebut, sehingga perlu dimasukkan sebagai bagian dari perencanaanya.

c. Pendekatan partisipatif.

Dalam Pendekatan ini diasumsikan bahwa penduduk pedesaan adalah subyek pembangunan, sebagai sumberdaya potensial yang perlu dilibatkan dalam pembangunan. Menurut Conyers (1992), pendekatan partisipatif didasarkan pada pertimbangan :

- i. Untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat agar proses pembangunan

memiliki kemungkinan keberhasilan yang semakin besar karena faktor ketidakpastian dapat dikurangi.

- ii. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini bukan sekedar memberikan kesan bahwa mereka diperhatikan, tetapi lebih pada membangun rasa memiliki dan mereka bagian dari suatu kebersamaan.
- iii. Merupakan suatu hak demokrasi dengan adanya keberagaman dalam komunitas masyarakat.

Pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan motivasi dari dalam diri masyarakat setempat, serta perubahan sikap mental masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan langsung. Pendekatan ini lebih mengutamakan inner construction dan jiwa manusia, maka peranan sosiopsikologis akan sangat dominan. Dengan keberhasilan pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa selanjutnya telah dapat "membentuk" dirinya sendiri dan bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan pembangunan yang ada di desanya.

Perkembangan sistem perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan dapat dilihat dari keberlanjutan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada. Sementara itu bagi kebanyakan masyarakat pedesaan yang masih berada pada kondisi kehidupan yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (basic need), akan sangat mempengaruhi tingkat perkembangan usahanya. Kondisi ini membuat usaha masyarakat yang ada menjadi sulit berkembang, karena hasil yang diperoleh masih digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. sebagaimana Tukiyat (2002), dalam strategi sisi permintaan, kondisi masyarakat masih berada pada tahap sub-sub sistem atau sub sistem. Kondisi demikian juga berimplikasi pada rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

H. Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D)

Dalam rangka otonomi daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Pembangunan Prasarana dan sarana dasar skala pedesaan, antara lain melalui program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), atau sebelumnya dikenal program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sejak fase I – III Ta. 1995/1996 s/d TA. 2003, telah memberikan hasil-hasil yang signifikan pada peningkatan akses dari dan ke desa-desa tertinggal serta terisolasi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan kerja di pedesaan, peningkatan keterampilan masyarakat dan terjadinya pemupukan modal di pedesaan. Namun demikian selama pelaksanaan tersebut masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan, antara lain : (i) Minimnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam memberikan masukan terhadap substansi Renstra Kecamatan; (ii) Kurangnya

komitmen pemerintah kabupaten terhadap programming atau cenderung "project oriented"; (iii) Rendahnya kapasitas instansi; (iv). Kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran P2D dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten pada umumnya; (v). Tidak adanya kerangka perencanaan wilayah kabupaten yang sifatnya operasional dan terpadu; (vi). Kurangnya keterlibatan legislatif; (vii). Minimnya ketersediaan data bagi perencanaan, dan (viii) Lemahnya dukungan/ komitmen penyediaan anggaran.

Bertolak dari pengalaman tersebut diatas, maka manajemen PKP2D melakukan upaya penyempurnaan program dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten untuk memperkuat kapasitasnya dalam mengelola pembangunan berperspektif *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*.

Misi umum Project PKP2D adalah menemu kenali model fasilitasi, dukungan dan asistensi dari pusat yang sesuai atau yang diperlukan daerah dalam penyelenggaraan P2D fase mendatang khususnya dan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat secara umum. Sedangkan misi khusus adalah membangun lembaga dan kelembagaan perencanaan prasarana atau sarana perdesaan secara partisipatif dan terpadu dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Cakupan wilayah program ini meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten dan seluruh desa/ kelurahan di setiap kecamatan.

1. Maksud dan Tujuan pelaksanaan project PKP2D.

Project PKP2D dimaksudkan sebagai fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal melalui forum-forum yang terpadu.

Tujuan pelaksanaan project PKP2D adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan penilaian atas kebutuhan pengembangan kapasitas dalam lingkup kabupaten dari aspek sistem, kelembagaan, dan personil terkait dengan peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- b. Menyusun tindakan yang layak untuk merespon kebutuhan yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.
- c. Menyusun data base manajemen informasi dan sistem pemantauan pada kawasan pengembangan terpilih untuk mengefektifkan pengawasan dan administrasi fungsi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan prasarana.
- d. Melatih aparat daerah untuk dapat menerapkan metode perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pengelolaan teknis dan administratif kegiatan di wilayahnya, sesuai dengan misi yang ditetapkan.
- e. Mengembangkan suatu model aplikasi pengembangan kapasitas kelembagaan, yang bila terbukti bermanfaat dapat diterapkan pada kecamatan/ kabupaten lain di seluruh Indonesia.

2. Keluaran Pelaksanaan Program PKP2D

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan program PKP2D adalah :

- a. Perumusan misi kabupaten terkait dengan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dalam aspek sosial ekonominya.
- b. Menyusun prioritas sektor dan kawasan yang akan dikembangkan dan menetapkan kawasan strategis yang akan dipilih dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.
- c. Menetapkan rumusan program tahunan dalam kawasan terpilih, yang terintegrasi dan sinkron dalam pelaksanaannya.
- d. Menyusun Memo Program Koordinatif (MPK) yang berisi tatalaksana program antar instansi dalam kawasan tersebut.
- e. Terjadinya proses pembelajaran serta meningkatnya peran serta dan pengalaman baik masyarakat maupun aparat dalam pembangunan, khususnya pembangunan prasarana sosial ekonomi pedesaan yang dicerminkan dengan meningkatnya kemampuan kelembagaan.

3. Gambaran Umum Mekanisme Pelaksanaan Projec PKP2D

Lingkup Project PKP2D memiliki spektrum yang lebih luas, selain berorientasi pada tingkat masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah kecamatan, level kabupaten berada dalam posisi fasilitasi atau pembinaan. Perluasan spektrum layanan dimaksud adalah berkaitan dengan : (i) . Adanya pergeseran unit atau skala perencanaan dari lingkup kecamatan di P2D ke skala kabupaten dalam PKP2D, (ii) perluasan komponen stake holder

yang melekat (built-in) didalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan yang termasuk di dalam kategori pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, khususnya unsur legislatif dan potensial stake holder lainnya seperti kelompok akademis, lembaga pemberdayaan usaha mikro, lembaga riset/ perguruan tinggi, unsur media massa, dan investor daerah; dan (iii) tambahan produk atau dokumen yang dihasilkan atau disebut Memo Program Koordinatif (MPK) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam skala komprehensif kabupaten, sebagai tambahan atas Renstra Kecamatan dan Program Investasi Kecamatan (PIK).

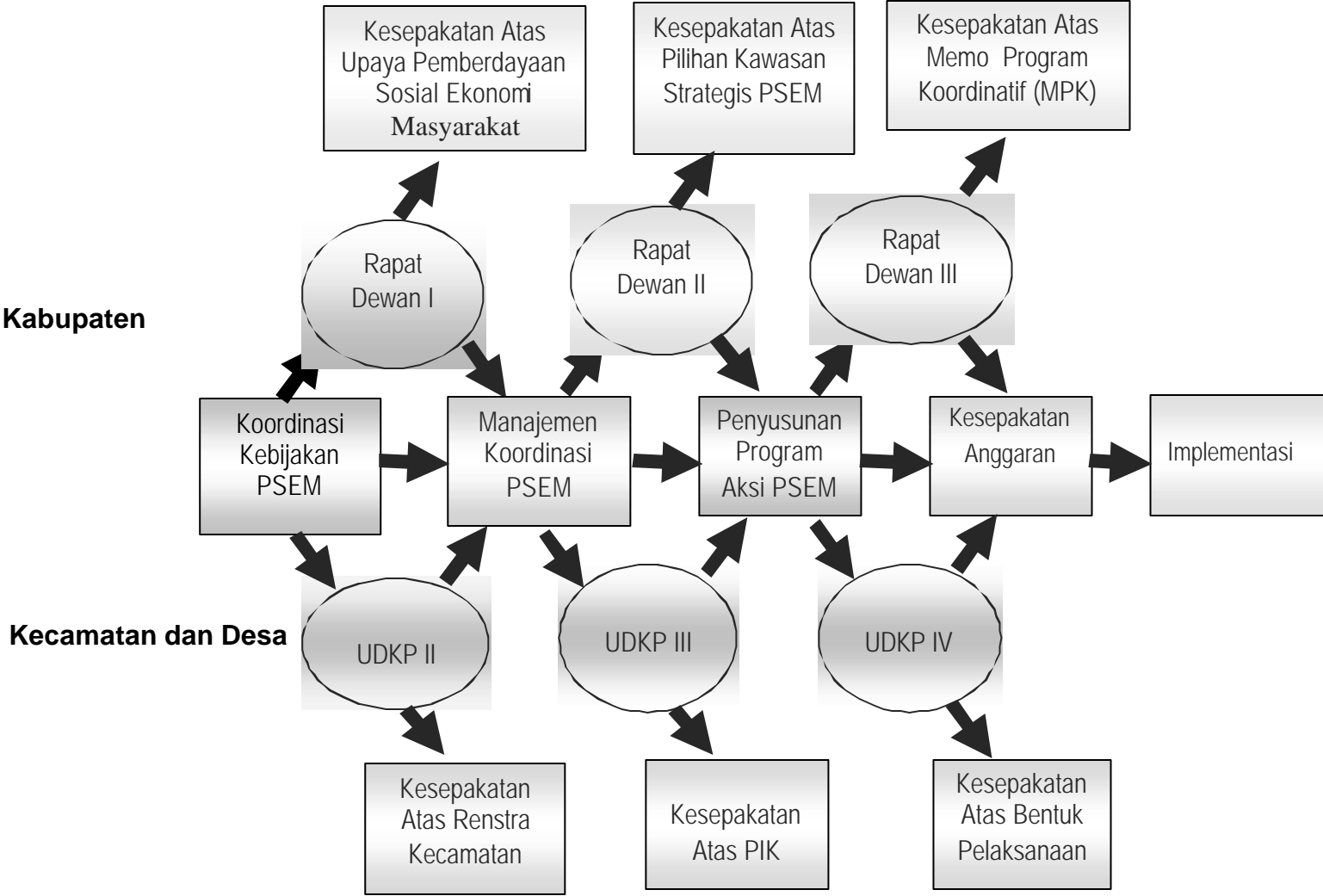
Titik perhatian program PKP2D ini tetap kepada aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin perdesaan di wilayah kabupaten.

Lokasi pelaksanaan program PKP2D berada di tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai satuan wilayah perencanaan, sedangkan pembangunan prasarananya berada dalam lingkup desa, kecamatan dan kabupaten, prasarana di wilayah desa sumber pembiayaannya dari dana JBIC yang merupakan usulan kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme program, sedang di kecamatan dan kabupaten yang menjadi prasarana pendukung dan sinergitas antar program yang menjadi usulan pemerintah kabupaten dan kecamatan melalui program dinas/sector dan hasil rakorbang dibiayai dari dana JBIC dan APBD pada lokasi kecamatan baru, sedang Kecamatan Sinjai Tengah merupakan lokasi lama (P2D) sumber dananya dari APBD sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh lembaga PSEM yang terdiri dari dinas/sector & DPRD pada Rapat Dewan III.

Secara garis besar struktur mekanisme kegiatan program PKP2D terdiri dari 2 bagian kerja yaitu : (i) Mekanisme partisipatif di tingkat desa dan kecamatan dan (ii) Mekanisme koordinatif di tingkat kabupaten.

Adapun kerangka mekanisme kegiatan program PKP2D dapat digambarkan dalam skema seperti berikut :

KERANGKA MEKANISME PROGRAM PKP2D



Gambar 1. Kerangka mekanisme program PKP2D

✍ Mekanisme Partisipatif di Tingkat Desa dan Kecamatan

Program PKP2D di tingkat kecamatan dan desa didahului dengan (i) Sosialisasi, (ii) Penyusunan Renstra Kecamatan, (iii) Penyusunan Program Investasi Kecamatan (PIK) kemudian Kesepakatan Bentuk Pelaksanaan (KSO atau Penunjukan Langsung) .

1. Tujuan

a. Tujuan Umum, yaitu mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan.

b. Tujuan khusus yaitu :

Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola pembangunan, (ii) menciptakan lapangan kerja, (iii) memperkuat kemampuan aparat dalam memfasilitasi masyarakat dan mengelola pembangunan, (iv) menyediakan prasarana transportasi pedesaan, (v) menyediakan prasarana kesehatan dan (vi) menyediakan prasarana ekonomi produktif khususnya dalam bidang pertanian.

2. Hasil yang diharapkan

a. Tersusunnya rencana strategis (Renstra) Kecamatan selama 3 tahun dan program Investasi Kecamatan (PIK) tahunan untuk pembangunan prasarana yang mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

- b. Tersedianya prasarana yang meliputi 3 (tiga) kategori : Prasarana transportasi, Prasarana penunjang produksi dan Prasarana Air bersih dan Sanitasi.
- c. Terjadinya proses pembelajaran serta meningkatnya peran serta dan pengalaman baik masyarakat maupun aparat dalam pembangunan khususnya pembangunan prasarana sosial ekonomi pedesaan yang dicerminkan dengan meningkatnya kemampuan kelembagaan.
- d. Menciptakan lapangan kerja baik tetap maupun temporer.

3. Ruang Lingkup Program.

Ruang lingkup dan jenis kegiatan program meliputi :

- a. Kategori I : Prasarana transportasi, yaitu : jalan tanah, jalan sirtu/telford, jalan woter bound Macadam, jalan rabat beton dan perlengkapannya yaitu jembatan, gorong-gorong, saluran pembuang, halte, tembok penahan ; tambatan perahu.
- b. Kategori II : Prasarana penunjang produksi, yaitu : Jaringan irigasi meliputi : bangunan pengambil, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan air, jalan inspeksi, tanggul pengaman, pintu air dan embung.
- c. Kategori III : Prasarana air bersih dan kesehatan, yaitu : sumur gali/ sumur pompa tangan, penangkap mata air, penampung air hujan, pengolahan air permukaan, instalasi pengolahan air sederhana, hidran umum dan MCK.

4. Pendekatan, Prinsip Pengelolaan dan Pola pelaksanaan.

- a. Pendekatan Program PKP2D merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, pengintegrasian pembangunan wilayah terpadu dengan penempatan kecamatan sebagai sentral. Pendekatan program sesuai azas, Dari, oleh dan Untuk masyarakat (DOUM)
- b. Keberpihakan kepada kaum miskin, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil, diutamakan kepada penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- d. Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
- e. Keswadayaan, yaitu kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- f. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan yang lain.

5. Prinsip pengelolaan.

Prinsip dalam pengelolaan program PKP2D yaitu :

- a. Acceptable, semua proses pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah, sehingga memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat.
- b. Transparant, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat
- c. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat
- d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

6. Pola Pelaksanaan.

Sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada suatu daerah, dimana pada satu pihak, masyarakat telah cukup mampu dan dipihak lain masyarakat belum mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan prasarana, maka pelaksanaan program PKP2D dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- a. Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan masyarakat melalui wadah Organisasi masyarakat Setempat (OMS) bekerjasama dengan kontraktor.

- b. Pelaksanaan Langsung (PL), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui wadah OMS.

7. Tahap dan periode pelaksanaan

Tahap dan periode pelaksanaan program PKP2D ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Persiapan Awal (T-1/TA. 2003) adalah tahap perencanaan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pada tahun anggaran 2003. Pada tahap ini terdiri dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan yang merupakan penentuan strategi dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, penyusunan program investasi Kecamatan (PIK) yang merupakan penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana tahunan, serta penyusunan desain teknis dan RAB prasarana yang akan dibangun pada tahun pertama (T/TA. 2004).
- b. Tahun I (T/TA. 2004) adalah tahap pelaksanaan pembangunan prasarana tahun pertama yang desain teknis dan RABnya telah dibuat pada tahun sebelumnya (T-1/TA.2003)
- c. Ada beberapa kegiatan penting yang merupakan bagian dari tahap pelaksanaan tersebut diatas, yaitu :
 - o Pada tahap perencanaan (T-1) Ta.2003, dilaksanakan diskusi UDKP yang merupakan forum kesepakatan antar pelaksana program PKP2D atas hasil kegiatan, yakni :

- Pada tahap perencanaan (T-1) Ta.2003, dilaksanakan diskusi UDKP yang merupakan forum kesepakatan antar pelaksana program PKP2D atas hasil kegiatan, yakni :
- UDKP-1, Sosialisasi dan Kesepakatan Kerja
- UDKP-2, Kesepakatan atas Renstra Kecamatan
- UDKP-3, Kesepakatan atas Program Investasi Kecamatan (PIK)
- UDKP-4, Kesepakatan atas bentuk pelaksanaan tahun berikutnya (KSO atau Penunjukan langsung).
- Pada pelaksanaan fisik setiap tahunnya, diakhiri dengan : Serah terima program dari pemerintah kepada masyarakat setempat, Pemanfaatan, melalui pengorganisian, pengoperasian dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana oleh masyarakat desa setempat
- Studi Evaluasi. pelaksanaan program PKP2D akan dilakukan studi secara mendalam oleh Lembaga Perguruan tinggi setempat atau LSM

Mekanisme Koordinatif di Tingkat Kabupaten

Mekanisme proses kegiatan program PKP2D dilakukan dengan menerapkan pola penanganan bertingkat yang saling terkait dan disesuaikan dengan variasi kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Pada intinya pengelolaan project PKP2D dilakukan dengan menerapkan manajemen fleksibel melalui adanya pembagian tingkatan dalam aspek pengelolaan kegiatan dengan aspek subyek yang dikelolanya.

Sedangkan prinsip pelaksanaan yang dijalankan harus tetap mengikuti paradigma pembangunan yang saat ini dianut, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan kesinambungan.

Secara garis besar mekanisme kegiatan PKP2D yang dikembangkan dapat diuraikan berdasarkan tahapan pokok kegiatannya sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM)

Kegiatan pada tahap ini diawali dengan lokakarya PSEM kabupaten yang diharapkan dapat diperoleh suatu komitmen bersama untuk merealisasikan upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten. Pada tahap ini juga dilakukan perumusan visi misi kabupaten, baik secara umum maupun khusus, terkait Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM). Sasaran utama pada tahap ini diharapkan dapat dicapai ***Kesepakatan Upaya PSEM*** dalam ***Rapat Dewan-I*** di kabupaten. Selanjutnya seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penyusunan Daftar Prioritas Program Sektor dan Kawasan Pengembangan PSEM dengan masukan” arahan Kebijakan Pengembangan Lintas Daerah dan Sektor” dari kegiatan Propinsi.

Hal terpenting dalam tahapan ini adalah sasaran upaya PSEM yang dihasilkan adalah merupakan masukan utama untuk ”Kajian Profil Kecamatan” pada proses penyusunan Renstra Kecamatan.

b. Tahap Manajemen Koordinasi PSEM

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan perumusan Misi PSEM Kabupaten dalam jangka Menengah (MJM-PM). Integrasi kawasan strategis dan jenis sektor PSEM, Fungsi dan peran kabupaten dalam kerangka

propinsi, profil eksisting kabupaten, Analisis potensi dan kendala kawasan strategis PSEM (KSPM), serta profil KSPM terpilih. Sasaran utama kegiatan pada tahap ini diharapkan dapat dicapai ***Kesepakatan atas Pilihan KSPM*** dalam ***Rapat Dewan-II*** di kabupaten juga adalah menerima masukan dari hasil Renstra Kecamatan.

c. Tahap Penyusunan Program Aksi PSEM

Pada tahap ini, diawali dengan kegiatan penjabaran kegiatan tahunan KSPM, dukungan alokasi tahunan program daerah, kaitan usulan kegiatan P2D, serta rumusan usulan kegiatan tahunan dan tahun pertama KSPM. Sasaran utama pada tahapan ini diharapkan dapat dicapai ***kesepakatan atas MPK*** pada ***Rapat Dewan – III***. Pada rapat tersebut diharapkan dapat dihasilkan 2 keluaran yaitu : (i) pemahaman yang baik dan komprehensif atas visi, misi PSEM dan program Aksi Tahunan PSEM, (ii) Komitmen Dewan terhadap program aksi tahunan pertama berikut implikasi alokasi volume dan nilai pembiayaannya.

I. Kerangka Fikir

Secara umum hakekat pembangunan adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya, secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan menunjang secara nasional, serta manusia pada umumnya, yang berkeadilan, demokratis, serta berwawasan lingkungan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum

dapat diimplementasikan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerapan strategi pembangunan di negara berkembang selalu mengabaikan masalah pemerataan. Pemerintah cenderung untuk memburu tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa pernah menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kesenjangan pendapatan, pengeksploitasian sumber daya alam dan lain-lain.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di daerah dan pedesaan adalah bantuan program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan ketersediaan prasarana infrastruktur yang berperspektif pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan dan dirumuskan bersama oleh seluruh stake holder (masyarakat, pemda, legislatif, LSM, Perguruan Tinggi, wartawan, kalangan swasta dll).

KERANGKA PIKIR

